

SKRIPSI

KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA



Oleh :

FENTY RISCHANA KARMILA

030115280

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SKRIPSI

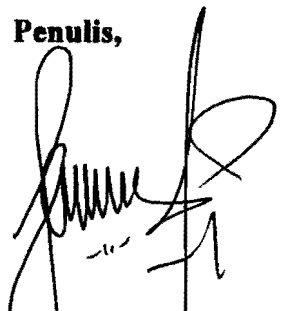
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.
NIP. 131 570 342

Penulis,



Fenty Rischana
NIM. 030115280

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam penulisan hukum tersebut maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa di wilayah PEMKOT Surabaya merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena pengadaan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian didanai oleh APBD kota Surabaya dimana didalamnya menyangkut dana masyarakat kota Surabaya, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Agar dapat dipertanggung jawabkan, maka pengadaan barang dan jasa di wilayah PEMKOT Surabaya menggunakan sistem E-Procurement dimana seluruh tahapan dan prosedur pengadaan dilakukan melalui media internet. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di PEMKOT Surabaya dapat diakses oleh semua pihak baik dari dalam maupun luar daerah bahkan dari luar negeri sekalipun melalui situs resmi E-Procurement PEMKOT Surabaya yakni www.Surabaya-eproc.or.id. Dengan keterbukaan sistem pengadaan tersebut diharapkan mampu menghemat

pengeluaran PEMKOT Surabaya serta mengurangi terjadinya praktik KKN sebab pejabat tidak serta merta menunjuk penyedia barang dan jasa, melainkan harus melalui proses lelang dan seleksi terlebih dahulu. Disamping itu melalui sitem ini diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan yang sehat di dunia bisnis pengadaan barang dan jasa untuk mempersiapkan era perdagangan bebas pada tahun 2010 mendatang.

Kontrak merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat fase-fase yang meliputi fase prakontrak, kontrak dan pelaksanaan kontrak. Sebelum penyusunan dan penandatanganan KPBJ maupun SPK maka proses yang terlebih dahulu harus dilaksanakan adalah pemilihan penyedia barang dan jasa. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui beberapa metode yakni metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Keempat metode tersebut dapat dilakukan melalui cara Pascakualifikasi dan Prakualifikasi. Tahapan-tahapan dalam Pascakualifikasi maupun Prakualifikasi merupakan salah satu langkah untuk memperoleh kesepakatan baik dalam hal kualitas pekerjaan maupun penawaran harga.

2. Kontrak merupakan salah satu bukti tertulis yang digunakan sebagai pengaman transaksi dimana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. KPBJ maupun SPK di PEMKOT Surabaya merupakan kontrak standart yang dibuat oleh instansi di wilayah PEMKOT sendiri. Keberadaan kontrak standart tersebut bukan merupakan suatu indikasi penggerogotan terhadap asas kebebasan berkontrak bagi salah satu pihak sebab KPBJ maupun SPK di PEMKOT Surabaya bersifat netral dan tidak terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar menawar (bergaining position) sehingga mengakibatkan eksistensi unsur kata sepakat diantara para pihak tidak terpenuhi.

Bilamana terjadi perselisihan atau sengketa terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di PEMKOT Surabaya maka penyelesaiannya sedapat mungkin melalui jalan musyawarah. Hal tersebut bertujuan agar perselisihan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. Namun apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Dan pada tingkat akhir dalam hal eksekusi putusan Arbitrase maka pelaksanaannya harus melalui Pengadilan Negeri.

2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan tersebut diatas maka saran yang dapat saya sampaikan melalui penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa di wilayah PEMKOT Surabaya sudah di cover dengan baik oleh aturan hukum yang berlaku. Namun aturan saja tidak akan berarti bilamana tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak dengan itikad baik. Selama ini Pengadaan barang dan jasa di PEMKOT Surabaya diawasi oleh Pengawas intern dari instansi PEMKOT Surabaya sendiri, sebaiknya pengawasan juga dilakukan oleh suatu lembaga independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pengadaan barang dan jasa yang akan memantau dan mengawasi proses pengadaan sejak tahap prakontrak, kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak baik kepada pihak pengguna maupun penyedia barang dan jasa sehingga aturan hukum yang ada tersebut dapat diaplikasikan dengan baik.
2. Dalam penyusunan KPBJ maupun SPK di PEMKOT Surabaya sebaiknya instansi yang menyusun standart kontraknya dapat menjalin prinsip-prinsip dalam hukum kontrak secara seimbang dan fair agar isi KPBJ maupun SPK tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggung jawab oleh para pihak sehingga apabila isi kontrak tersebut dilaksanakan dengan tanggung jawab, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan yang menimbulkan sengketa diantara para pihak karena setiap sengketa pasti akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

